

PRIORITAS NASIONAL

LINGKUNGAN HIDUP

Pembalakan Liar di Tapanuli Utara

Nawacita dan RPJMN telah menetapkan cita-cita pembangunan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah adalah memberantas kejahatan sumber daya alam dan lingkungan, termasuk menindak pelaku pembalakan liar yang menggerus hutan-hutan kita. Peraturan perundang-undangan telah mengatur perihal ini, antara lain dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun pada praktiknya perusakan hutan masih terjadi.

Contoh kasus seperti yang disampaikan pelapor, terjadi pembalakan ilegal di Tapanuli Utara ([#1425184](#)) yang dikhawatirkan akan memperparah kondisi hutan dan berdampak pada meningkatnya risiko bencana alam di wilayah setempat. Oleh karena itu, Kementerian LHK diminta lebih tanggap dan terus berkoordinasi dengan Pemda untuk mencegah dan mengatasi masalah ini. Pengawasan perlu ditingkatkan oleh penegak hukum, polisi hutan, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah.

ENERGI

Program Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Pemerintah terus melakukan evaluasi mengenai pemberian subsidi listrik agar lebih tepat sasaran. Langkah yang diambil antara lain mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif ke sektor produktif dan mengarahkan subsidi untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Manfaat lainnya adalah untuk efisiensi anggaran, menjaga ketahanan fiskal, mendukung konservasi energi, dan meningkatkan pemerataan rasio elektrifikasi nasional.

Program subsidi listrik tepat sasaran ini juga dalam rangka merealisasikan janji Presiden Jokowi, bahwa anggaran negara harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin, dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, program subsidi listrik tepat sasaran ini sangat penting dan sudah mulai dijalankan secara bertahap oleh PLN ([#1391223](#)). Ke depannya, PLN akan terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan TNP2K ([#1450397](#)) untuk melakukan pendataan, verifikasi, dan validasi karena kualitas data adalah kunci sukses program ini.

REFORMASI BIROKRASI

Indikasi Masalah dalam Tender P2JN

Presiden Jokowi dalam Nawacita telah berjanji untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Inilah salah satu agenda prioritas pemerintah. Dalam upaya ini, pemerintah membuka ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memantau jalannya pembangunan, termasuk dalam mencermati proses pengadaan barang/jasa (PBJ) pemerintah.

Hal ini dimanfaatkan masyarakat untuk menyoroti proses PBJ, seperti dalam laporan ([#1421317](#)). Pelapor meminta klarifikasi terkait pemenang lelang di satker Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (P2JN) di salah satu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kementerian PUPR. Menurut pelapor, pemenang lelang selalu berkisar pada perusahaan yang itu-itu saja, padahal terindikasi perusahaan tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti dan memenangkan lelang.

Laporan ini perlu segera diklarifikasi, dan Kementerian PUPR telah meneruskan laporan ke Ditjen Bina Marga namun belum mendapatkan tanggapan lebih lanjut.

PENDIDIKAN

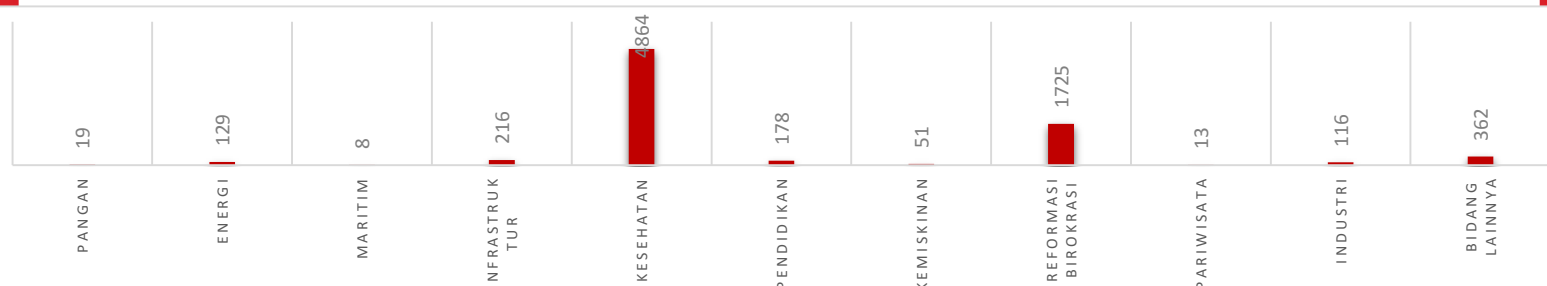
Tunjangan Guru Terlambat Cair

Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Pendidikan adalah kawah candradimuka untuk bangsa yang berkarakter dan berdaya saing. Sesuai amanat Presiden Jokowi, seluruh komponen bangsa harus siap dan bergotong-royong dalam memenangkan persaingan global, antara lain melalui pendidikan.

Guru adalah ujung tombak dunia pendidikan, dan kesejahteraan guru menjadi salah satu faktor penentu dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk menjaga kualitas akademik dan kompetensi guru, pemerintah menerapkan kebijakan sertifikasi guru beserta pemberian tunjangan untuk mendorong peningkatan mutu tenaga pendidik.

Namun, pada kenyataannya tunjangan sertifikasi tersebut sering mengalami keterlambatan pembayaran ([#1422928](#)), seperti terjadi di Sumatera Utara ([#1422646](#)) dan Sulawesi Tenggara ([#1423482](#)). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa dana tunjangan yang terlambat cair akan dibayarkan pada periode pembayaran tahun berikutnya.

KATEGORI LAPORAN PRIORITAS NASIONAL



1. Indikasi penyelewengan dana desa di Sumatera Utara, Riau, dan Lampung
2. Penangkapan ikan secara ilegal di Pulau Simeulue, Aceh
3. Indikasi penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di Selat Bangka, Kep. Bangka-Belitung
4. Permohonan pembangunan infrastruktur perhubungan darat di Jambi

1. Pencairan tunjangan guru tidak sesuai besaran di Kalimantan Barat
2. Masalah kepesertaan BPJS Kesehatan dan pelayanan kesehatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara
3. Penempatan pendamping desa tidak sesuai kebutuhan di Kalimantan Timur

1. Kekurangan tenaga perawat khusus penyakit menular di Aralle, Sulawesi Barat
2. Permohonan pembangunan infrastruktur di Labunia, Sulawesi Tenggara
3. Indikasi penyelewengan anggaran proyek infrastruktur di Gorontalo

1. Penarikan biaya dalam pengurusan sertifikasi guru di Maluku
2. Informasi rekrutmen pendamping desa di Maluku
3. Permohonan pemerataan pembangunan infrastruktur di Maluku



Keterangan Peta:

- 1 - 51 Laporan
- 51 - 500 Laporan
- > 500 Laporan

1. Raskin berkualitas buruk di Tangerang, Banten
2. Masalah pemeliharaan waduk-waduk di DKI Jakarta
3. Pungutan liar oleh polisi di Depok, Jawa Barat
4. Saran untuk ketepatan sasaran pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Jawa Timur

1. Penyalahgunaan KITAS oleh WNA di Bali
2. Pengaduan pelayanan BPJS Kesehatan terkait fasilitas kesehatan dan penagihan iuran di Bali
3. Apresiasi pencegahan kerusakan di Lembaga Masyarakat (Lapas) di Bali

1. Rekrutmen pendamping desa secara ilegal di NTB
2. Indikasi penyalahgunaan dana BOS di NTB
3. Masalah intensitas pemadaman listrik di Kupang, NTT
4. Rencana kerja sama pembukaan kelas reguler perawat di NTT

1. Masalah kesejahteraan guru honorer di Sorong, Papua Barat
2. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Papua
3. Pengaduan harga gas elpiji melonjak naik di pasaran di Papua Barat

PENGLOLAAN LAPORAN MASYARAKAT

Tindak Lanjut Instansi

Terdapat kemajuan signifikan karena sebagian besar kementerian/lembaga telah menindaklanjuti laporan masyarakat di LAPOR!. Meski begitu, terdapat catatan di sektor kesejahteraan rakyat karena mayoritas laporan yang diampu Kementerian Sosial belum juga direspons. Kritik juga disampaikan masyarakat terhadap instansi di sektor pertahanan dan keamanan. Kemenko Polhukam, Kementerian Pertahanan, Mabes Polri, dan Mabes TNI mendapatkan sorotan karena banyak laporan yang belum tertangani, sehingga sebagian komentar publik menilai instansi-instansi tersebut belum berkomitmen dalam mengelola aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Statistik selengkapnya dapat disimak di: <https://www.lapor.go.id/statistik/>

Keterhubungan Instansi

Kantor Staf Presiden bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri telah menghubungkan seluruh Kantor Perwakilan RI di luar negeri – meliputi KBRI, KJRI, dan KRI – ke dalam sistem LAPOR!.

Meski terpisah jarak, masyarakat Indonesia di luar negeri kini akan lebih mudah menyalurkan aspirasi dan pengaduan untuk pemerintah, termasuk mengawal pelayanan di setiap Kantor Perwakilan RI. Hal ini merupakan implementasi Nawacita, yaitu semangat menghadirkan negara untuk seluruh warga negara Indonesia di manapun berada.

Perkembangan Terkini

Pada 9 -11 Februari 2016 Pengelola LAPOR! hadir dalam pembahasan kerja sama tripartit antara Kantor Staf Presiden, Kementerian PAN-RB, dan Ombudsman RI dalam rangka menyukseskan implementasi Roadmap Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) di Kota Bogor. Pertemuan ini juga didukung oleh MSI SIAP-1 yang menjadi fasilitator kegiatan.

Para pihak mengevaluasi pencapaian implementasi SP4N tahun 2015 dan menyusun rencana aksi tahun 2016, disertai pembagian peran dan tugas dalam mengawal roadmap ini agar tercapai dengan baik sesuai amanat Perpres 76/2013 dan Permenpan 3/2015.

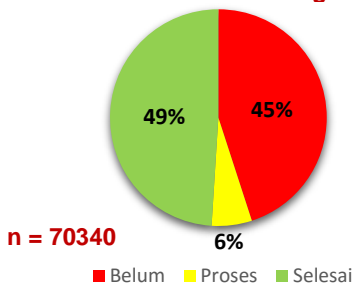
Kegiatan Pengelola

Pengelola LAPOR! kembali membuka program magang untuk menjaring anak-anak muda potensial dalam mendukung pengelolaan harian tim yang bernaung di Kedeputusan I Kantor Staf Presiden ini.

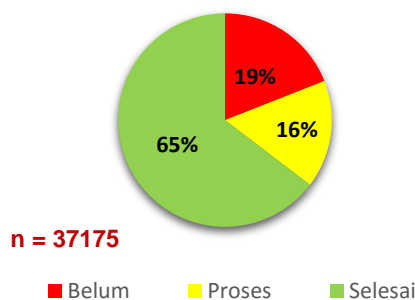
Terpilih 12 orang mahasiswa dan lulusan dari berbagai perguruan tinggi terbaik di Indonesia, yaitu dari UI, UGM, Undip, ITS, Unhas, UPH, UMB, Polimedia, LSPR, dan Universitas Paramadina. Peserta Program Magang Angkatan X ini dibagi ke dalam 4 divisi, yaitu *Participation Analyst (PA)*, *Programming Specialist (PS)*, *Communication Specialist (CS)*, dan *Design Specialist (DS)*.

STATISTIK KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA S.D. FEBRUARI 2016

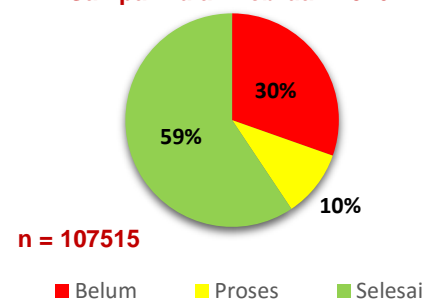
Status Laporan Kementerian/Lembaga



Status Laporan Pemda



Status Laporan Seluruh K/L/D Sampai Bulan Februari 2016



Statistik Umum

Pada Februari 2016, terdapat **5.951 laporan** yang diteruskan ke instansi pemerintah pusat/daerah untuk ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, 4.774 laporan berstatus selesai dan 1.177 laporan masih dalam proses penanganan.

Sampai dengan Februari 2016:

- Laporan masuk berjumlah **11.263** dengan rata-rata **533** laporan per hari.
- Komentar publik berjumlah **346** dengan rata-rata **12** komentar per hari.
- Dukungan (*likes*) berjumlah **1.143** dengan rata-rata **39** dukungan per hari.



LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

Ringkasan Laporan FEBRUARI 2016

Pertanyaan tentang ringkasan laporan serta saran dalam penyajiannya dapat dikirimkan ke:

kontak@lapor.go.id